

**PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

Zahra Meisya Prameswari¹, Sirodjul Munir², *Kiki Endah³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: kiki_spt@unigal.ac.id*

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan melalui komunikasi yang dilakukan dengan komunitas informasi masyarakat sehingga dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas dan melakukan disposisi dengan menempatkan petugas sesuai dengan keahliannya serta menyusun struktur organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan. Namun demikian masih terdapat indikator yang belum dilakukan secara optimal seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sehingga kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan belum diimplementasikan dengan baik apalagi pembentukan KIM di Kabupaten Pangandaran belum lama, oleh karena itu maka Dinas Kominfo selaku pelaksana kebijakan melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk membantu pengelola KIM dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional KIM selain itu untuk mengatasi pemahaman pengelola KIM maka Dinas Kominfo mengupayakan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola KIM sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pengembangan dan Pemberdayaan, Lembaga Komunikasi Perdesaan*

PENDAHULUAN

Perdesaan juga memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Namun sering kali akses komunikasi informasi terbatas di suatu

wilayah perdesaan. Seiring dengan berjalannya perkembangan Informasi dan Komunikasi menjadi kunci dalam kesuksesan pembangunan di perdesaan. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga komunikasi perdesaan. Kesenjangan akses terhadap informasi dan teknologi antar perdesaan dan perkotaan merupakan masalah yang berkepanjangan, dimana daerah perkotaan lebih mudah mengakses informasi ketimbang di perdesaan. Hal ini yang menjadi masalah yakni adanya ketidaksetaraan dari segi Pembangunan, Pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam bidang informasi dan komunikasi di era sekarang sangat lah penting, di era modern sekarang tidak banyak juga yang belum bisa mengakses informasi dan komunikasi terkhususnya di daerah terpencil dan Kawasan perdesaan.

Pembangunan perdesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi di era industri generasi keempat (4.0), Desa dituntut mengadopsi seluruhnya untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, yang merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh platform manajemen media sosial Hootsuite dan agen pemasaran sosial *we are social* bertajuk "*Global Digital Report 2020*", hampir 64% penduduk Indonesia terhubung dengan internet. Studi yang dipublikasikan pada akhir Januari 2020 menunjukkan penggunaan internet di Indonesia mencapai 175,4 juta jiwa sedangkan penduduk Indonesia totalnya yakni sekitar 272,1 juta jiwa dibandingkan tahun 2019, sekarang jumlah pengguna internet meningkat sekitar 17% atau setara dengan 25 juta pengguna (Fitriani, 2020).

Perkembangan informasi dan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tingkat daerah.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan dapat dilakukan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Kelompok informasi masyarakat, atau kelompok sejenisnya, adalah kelompok yang mandiri, kreatif, dan dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk Masyarakat itu sendiri, yang bekerja untuk mengelola informasi dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Yulia, (2015), menyatakan bahwa : “Keberadaan Lembaga komunikasi perdesaan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan model komunikasi dengan rakyat bukan komunikasi untuk rakyat”. Sebagai bagian dari kebijakan untuk mengatasi hambatan informasi di Masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang penyebaran informasi secara Nasional oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut menteri komunikasi dan informasi pun mengeluarkan Peraturan No.08/Per/M.Kominfo/6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam konteks Kabupaten Pangandaran dalam permasalahan ditingkat perdesaan diantaranya disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menyebutkan bahwa pemberdayaan Masyarakat desa yang masih belum optimal, dan secara khusus di bidang informatika yang masih belum optimal dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dalam bidang informatika.

Faktanya sampai saat ini Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Pedesaan di Kabupaten Pangandaran masih belum diimplementasikan secara optimal. Selain itu terdapat problem regulasi yang menghambat berkembangnya kelompok-kelompok informasi di Daerah. Regulasi yang ada belum mengatur secara detail dan belum adanya produk hukum daerah yang menterjemahkan regulasi pusat, dan regulasi saat ini tidak cukup rinci. Oleh Karena itu, penting dan menarik untuk dibahas dalam penelitian ini.

Begitupula berdasarkan hasil observasi awal diketahui Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Belum jelasnya penyampaian pesan mengenai implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Pangandaran sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan dan yang diterima oleh Masyarakat.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai secara kualitas dan kuantitas dan juga sarana dan prasarana yang belum tersedia dengan lengkap sehingga program belum berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Sikap para pelaksana kebijakan yang dinilai belum konsisten terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 08 /PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
4. SOP (*Standard Oprasional Procedure*) yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan secara konsisten sehingga menjadi kendala pada proses implementasi kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan membuktikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan dikatakan belum berjalan dengan baik, dengan adanya Implementasi kebijakan pengembangan dan

pemberdayaan lembaga komunikasi perdesesaan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012 : 9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran, Kabid, dan bagian Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan, yaitu Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, yang merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan Lembaga Komunikasi Perdesaan atau Kelompok Informasi Masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada tingkat daerah. Tujuan kelompok informasi masyarakat adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal-balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan. Selain dari tujuan tersebut, kelompok informasi masyarakat berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota kelompok informasi masyarakat, dari kelompok informasi masyarakat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat.

Kelompok informasi masyarakat sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. Kelompok informasi masyarakat sebagai sarana peningkatan literasi anggota kelompok informasi masyarakat dan masyarakat di bidang informasi dan media massa yang memiliki nilai ekonomi. Dalam implementasi kebijakan, menjadi sebuah keniscayaan bagaimana mengorganisasi berbagai sumber daya yang ada, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Mustahil implementasi sebuah kebijakan tanpa mengorganisasi sumber daya.

Implementasi kebijakan menjadi salah satu proses dari suatu kebijakan setelah adanya peraturan. Saat ini Kabupaten Pangandaran tengah berupaya mewujudkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi tidak hanya mengenai pengukuran

melalui kuantitas melainkan juga dari kualitas. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung terwujudnya masyarakat informasi adalah dibentuknya program KIM atau Kelompok Informasi Masyarakat. Program ini merupakan sebuah program yang ditujukan untuk masyarakat untuk mampu mengoptimalkan manfaat informasi di kehidupan mereka. Pengembangan dan pemberdayaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat terutama yang ada dalam memenuhi kebijakan tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Pedesaan bukanlah suatu hal yang mudah, meskipun sudah ada Kelompok Informasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Pangandaran yang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi dalam kenyataannya lembaga komunikasi pedesaan belum optimal dalam menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan publik. Tidak hanya itu, sebelum adanya kebijakan publik yang sah tentunya harus melalui komunikasi terlebih dahulu agar dapat diketahui arah dan tujuan dari kebijakan publik yang dirumuskan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaksana kebijakan atau pembuat kebijakan memahami atau mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

a. Dinas Kominfo sebagai implementator menyampaikan pesan mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat sebagai penerima pesan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Dinas Kominfo belum dapat menyampaikan secara jelas mengenai kebijakan kepada masyarakat hal ini dikarenakan keberadaan kelompok informasi masyarakat yang ada di desa kurang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Wursanto, (2015:97) yang menyatakan bahwa, adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi yang antara lain bersifat teknis seperti Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi/ keadaan, dan kondisi peralatan.

Dengan demikian adanya ketidaksesuaian Dinas Kominfo sebagai implementator dalam menyampaikan pesan secara jelas mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat karena kurangnya kelompok informasi masyarakat dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga informasi kebijakan pemerintah daerah kurang diterima dengan jelas oleh masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang dukungan dari pemerintah daerah kepada kelompok informasi masyarakat yang ada di desa dalam bentuk anggaran maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat membantu mensosialisasikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyampaikan pesan secara jelas mengenai kebijakan kepada masyarakat yang

antara lain pelibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk memperhatikan keberadaan kelompok informasi masyarakat serta Dinas Kominfo mengajukan perubahan anggaran kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membantu kegiatan operasional lembaga komunikasi perdesaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

b. Dinas Kominfo menyampaikan kejelasan pesan mengenai kebijakan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo belum dapat menyampaikan pesan mengenai kebijakan kepada masyarakat karena kurangnya pemberdayaan terhadap kelompok informasi masyarakat baik melalui kegiatan pembinaan langsung, sosialisasi maupun workshop terkait dengan penguasaan teknologi informasi yang sangat penting dikuasai oleh KIM dalam menyampaikan setiap pesan kepada masyarakat secara cepat.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013:223) bahwa, dalam meningkatkan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni IPTEKS, sehingga seiring perkembangan IPTEKS, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi mutlak harus menjadi perhatian.

Dengan demikian Dinas Kominfo belum dapat menyampaikan pesan secara jelas mengenai kebijakan kepada masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya peran aktif kelompok informasi masyarakat dalam membantu menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan anggota KIM terhadap penggunaan teknologi informasi sehingga belum dapat memanfaatkan berbagai media yang menunjang penyebaran informasi kepada masyarakat. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan KIM antara lain disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah desa dalam membantu KIM di desanya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya keberadaanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa sehingga Dinas Kominfo belum dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap KIM secara rutin.

Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya untuk dapat menyampaikan kejelasan pesan mengenai kebijakan kepada masyarakat yang antara lain melakukan pembinaan langsung kepada kelompok informasi masyarakat dan melaksanakan pelatihan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat memperlancar penyampaian informasi kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pemerintah desa untuk membantu keberadaan kelompok informasi masyarakat.

c. Dinas Kominfo konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo belum konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa namun belum dapat membantu menyampaikan informasi dari pemerintah maupun belum dapat mengembangkan potensi yang ada di desa. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya konsistensi Dinas Kominfo dalam menyampaikan pesan

atau perintah dalam mengimplementasikan kebijakan kepada kelompok informasi masyarakat.

Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Winarno (2018:175) yang menyatakan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian Dinas Kominfo kurang konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat karena kurangnya konsistensi dalam menyampaikan perintah atau pesan kepada kelompok informasi masyarakat yang disebabkan adanya hambatan-hambatan Dinas Kominfo dalam mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dalam rangka pemberdayaan anggota KIM sehingga masih banyak kelompok informasi masyarakat yang ada di desa belum memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi maupun melakukan penggalian informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan kerjasama dengan pemerintah desa untuk membantu kelompok informasi masyarakat karena keberadaan kelompok tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengembangan potensi desa.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, faktor sumber daya mempunyai peranan penting. Sumber daya itu meliputi sumber daya manusia, sumberdaya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Sumber daya, diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam output. Sedangkan teknologis yang dimaksud adalah kemampuan transformasi dari organisasi (Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., & Sobari, M., 2024).

a. Dinas Kominfo menyediakan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo belum optimal dalam menyediakan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas dalam melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya melakukan pemberdayaan kepada anggota KIM yang ada di setiap desa. Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013:114) bahwa, pemberdayaan sangat penting dilakukan untuk dapat melakukan penguatan/pengembangan kapasitas individu sehingga setiap individu memiliki peningkatan kemampuan yang dapat membantu individu dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dinas Kominfo belum dapat menyediakan sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas dalam pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat yang ada

di desa hal ini disebabkan kurangnya peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam mengembangkan KIM serta kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan KIM sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu Dinas Kominfo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan anggota KIM sehingga selain untuk menarik masyarakat lain untuk bergabung dalam KIM juga meningkatkan keterampilan anggota KIM dalam melaksanakan penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat serta memperluas jaringan KIM yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota KIM.

b. Dinas Kominfo menyediakan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan kelompok informasi masyarakat yang ada di desa belum dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat karena kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah sehingga Dinas Kominfo sebagai pelaksana belum dapat melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dwidjowijoto (2017:116) menyatakan bahwa : "Sebenarnya pemberdayaan dapat memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan dalam memberikan jalan kesumber penghasilan dan memberi kesempatan untuk lebih meningkat". Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dinas Kominfo dalam menyediakan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat yang ada di tiap desa karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat hal ini disebabkan Dinas Kominfo sebagai pelaksana kebijakan kurang mendapat dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan Lembaga Komunikasi Perdesaan. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyediakan anggaran yang memadai dalam mengembangkan dan memberdayakan Lembaga Komunikasi Perdesaan yang antara lain dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah desa untuk dapat membantu memberikan anggaran kepada kelompok informasi masyarakat yang ada di desa karena kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut tidak memiliki alokasi anggaran khusus sehingga mengharapkan adanya swadaya dari berbagai pihak agar kegiatan operasional kelompok informasi masyarakat berjalan lancar.

c. Dinas Kominfo menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai untuk kemudahan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo belum dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM sehingga kelompok informasi masyarakat kesulitan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dalam penyampaian informasi dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer maupun jaringan internet sementara pada saat ini sarana dan prasarana tersebut kurang memadai.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Kaho (2017:193) yang memberikan pandangannya berkaitan dengan keterbatasan peralatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengatakan bahwa, secara umum dapat disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan peralatan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitasnya, sehingga kelancaran aktivitas pemerintahan daerah menjadi terhambat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dinas Kominfo kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga belum dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi KIM di setiap desa selain itu kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam membantu kebutuhan KIM sehingga kelompok tersebut belum dapat melaksanakan aktivitasnya secara optimal. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kemudahan dalam pelaksanaan antara lain melakukan integrasi dengan website kecamatan sehingga dapat menyediakan template free, model website serta untuk desa bisa dibantu dibuatkan atau diintegrasikan dengan yang sudah ada, sehingga desa tidak usah menganggarkan dari sisi software, karena berpotensi terjadi hal-hal teknis juga bisa mengakibatkan desa ketergantungan pihak ketiga, dengan teknisnya.

Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai keputusan awal dan jika sebaliknya tatkala sikap pelaksana negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

a. Dinas Kominfo menempatkan staff sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kominfo telah menempatkan staff sesuai dengan keahliannya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM namun kurang ditunjang dengan jumlah petugas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM. Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Widodo (2011:98) yang mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Dengan demikian Dinas Kominfo telah menempatkan staff sesuai dengan keahliannya dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM namun kurang ditunjang dengan jumlah petugas yang memadai

hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan Dinas Kominfo dalam menempatkan staff sesuai dengan keahliannya hal ini disebabkan keterbatasan jumlah petugas yang mengimplementasikan kebijakan sehingga belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada semua kelompok yang ada di desa secara rutin. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menempatkan staff sesuai dengan keahliannya hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam mengembangkan KIM sehingga dapat meminimalisir jumlah kebutuhan petugas selain itu meningkatkan kerjasama yang terjalin antara pengelola KIM sehingga ketika ada permasalahan dapat saling membantu.

b. Dinas Kominfo memberikan insentif atau biaya tambahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo kurang memberikan insentif atau biaya tambahan terhadap pengelola KIM sehingga menyebabkan kurangnya ketertarikan masyarakat untuk bergabung dalam komunitas informasi masyarakat dan menyebabkan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM belum dapat diimplementasikan secara optimal. Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Subarsono (2019:12) yang mengatakan bahwa, pada tahap implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dinas Kominfo kurang memberikan insentif atau biaya tambahan terhadap pengelola KIM hal ini disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membantu mengembangkan kelompok informasi masyarakat sehingga Dinas Kominfo kesulitan dalam memberikan insentif kepada pengelola KIM. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan insentif atau biaya tambahan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan meminta pemerintah desa untuk memberikan anggaran dari dana desa kepada kelompok informasi masyarakat sehingga dengan adanya insentif kelompok dapat memenuhi kebutuhannya.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, departemen atau pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang

pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

a. Dinas Kominfo memberikan pemahaman mengenai SOP kepada para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo kurang memberikan pemahaman mengenai SOP kepada para pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan anggota kelompok informasi masyarakat masih kurang menyampaikan informasi kepada masyarakat karena kesulitan dalam memahami mekanisme dalam melaksanakan kebijakan.

Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Widodo (2018:107) yang menyatakan bahwa, demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo kurang memberikan pemahaman mengenai SOP kepada para pelaksana kebijakan karena adanya hambatan-hambatan Dinas Kominfo yang antara lain kurangnya petugas yang memadai dalam melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada pengelola KIM di tiap desa sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih jarang yang menyebabkan keberadaan KIM antara ada atau tiada karena kelompoknya ada namun tidak aktif dalam melaksanakan berbagai aktivitas di masyarakat. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pemahaman mengenai SOP kepada para pelaksana kebijakan yaitu dengan mengundang pengelola KIM untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di Kantor Dinas Kominfo terkait dengan mekanisme kerja KIM di masyarakat sehingga keberadaan KIM dapat membantu masyarakat.

b. Dinas Kominfo melakukan verifikasi dalam rangka pengimplementasian sebuah kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo telah melakukan verifikasi dalam rangka pengimplementasian sebuah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM walaupun hasil verifikasi yang dilakukan kurang ditindaklanjuti terhadap setiap permasalahan yang ditemukan sehingga hal ini kurang memberikan masukan kepada pengelola KIM dalam memperbaiki berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil verifikasi oleh Dinas Kominfo. Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Wibawa (2014: 13-14), yang menyatakan bahwa, verifikasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program-program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Dinas Kominfo telah melakukan verifikasi dalam rangka pengimplementasian sebuah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM walaupun hasil verifikasi belum dapat dilakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh KIM. Adapun hambatan

yang dihadapi dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi karena kurangnya dukungan pemerintah desa dalam membantu mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat serta kurangnya dukungan pemerintah sehingga permasalahan hasil verifikasi belum dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu maka Dinas Kominfo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan melakukan verifikasi dalam rangka pengimplementasian sebuah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kecamatan maupun pemerintah desa untuk dapat membantu pengelola KIM dalam melaksanakan aktivitasnya menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Pangandaran diketahui bahwa Dinas Kominfo selaku *leading sector* dalam melaksanakan kebijakan belum optimal sehingga keberadaan KIM belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran dan sarana prasarana serta pemahaman pengelola KIM terhadap mekanisme atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugasnya sehingga Dinas Kominfo berupaya meningkatkan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk membantu pengelola KIM sehingga dapat mengatasi permasalahan sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional KIM selain itu untuk mengatasi pemahaman pengelola KIM maka Dinas Kominfo mengupayakan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola KIM sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pangandaran secara umum belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan 10 indikator yang diteliti terdapat 7 indikator yang belum berjalan dengan optimal dan 3 indikator berjalan optimal.

Adapun hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan antara lain kurangnya anggaran dan sarana prasarana serta pemahaman pengelola KIM terhadap mekanisme atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugasnya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informasi berupaya meningkatkan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk membantu pengelola KIM sehingga dapat mengatasi permasalahan sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional KIM selain itu untuk mengatasi pemahaman pengelola KIM maka Dinas Kominfo mengupayakan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola KIM sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran yang jelas bagi setiap KIM yang ada di Desa Pangandaran mengingat terbentuknya KIM masih baru sehingga memerlukan berbagai sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai sehingga dapat memperlancar pelaksanaan berbagai kegiatan oleh KIM di masing-masing desa
2. Pemerintah Kecamatan sebaiknya dapat membantu kelompok informasi masyarakat yang ada di desa untuk dapat menggunakan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya.
3. Pemerintah Desa sebaiknya dapat menyediakan anggaran bagi kelompok informasi masyarakat karena keberadaanya dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan potensi desa dan menginformasikannya secara luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Wrihatnolo. 2017. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar. Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media. Komputindo.
- Kaho, Josef Riwu, 2017, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik. Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soebianto, Mardikanto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif. Kebijakan Publik*. Prihandono
- Subarsono. 2019. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2014. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Widodo, Budiharto. 2011. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi [Buku]. - Yogyakarta : Andi,.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., & Sobari, M. (2024). Pelatihan Manajemen BUMDes Berbasis Sosiokultural Masyarakat Lokal di Desa Sukamaju. *Warta LPM*, 21-32.
- Winarno, Budi. 2018. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Wursanto, 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yulia, M. (2015). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat)*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 19(1).

Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang penyebaran informasi secara Nasional oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan No.08/Per/M.Kominfo/6/ 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.